

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan rangkaian periode Rencana Strategis 2025 – 2029. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Melanjutkan sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja tahun 2025 ini ditetapkan dalam pencapaian 12 (Dua Belas) sasaran strategis dan 16 (Enam Belas) indikator kinerja utama.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan dan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini.

Buntok, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN



Dr. ITA MINARNI, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790812 200802 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) DPUPR ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025. LaKIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini DPUPR senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LaKIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LaKIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBDP Tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 490.088.041.337,87 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 70.269.321.251,87 dan Belanja Modal sebesar Rp. 419.818.720.086,00 . Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja hibah. Sedangkan Belanja Modal digunakan unruk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Realisasi keuangan belanja operasi sebesar 93,15% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 65.460.772.558,10. Realisasi keuangan belanja modal sebesar 98,44% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 413.294.204.754,00. Perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2025 adalah realisasi fisik sebesar a%. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dapat dikategorikan berhasil.



LaKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Buntok, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN



Dr. Ita Minarni, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790812 200802 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
Daftar Isi	4
BAB I Pendahuluan	6
I.1 Latar Belakang.....	6
I.2 Maksud dan Tujuan.....	6
I.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	7
I.4 Keuangan	15
I.5 Sistematika Pembahasan	17
BAB II Perencanaan Kinerja	18
II.1. Rencana Strategis	19
II.2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	23
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
II.4. Perjanjian Kinerja 2025.....	38
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	44
III.1 Capaian Kinerja	44
III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	45
III.1.2 Membandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	51
III.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	57
III.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	59
III.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Kinerja	62
III.2 Realisasi Anggaran.....	77



BAB IV Penutup	89
Lampiran	
Perjanjian Kinerja	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah memberik

an informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih focus, efektif efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

I.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana disebut dalam BAB VIII, yaitu :

a. Kedudukan, Tugas, Fungsi

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 3 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Bina Marga;
- 4) Bidang Sumber Daya Air;
- 5) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- 6) Bidang Penataan Ruang;
- 7) Bidang Bina Jasa Konstruksi;
- 8) Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 11) Jabatan Fungsional.

Adapun penjelasan tentang pejabat tersebut adalah:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mennevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan pembinaan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi serta Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas. Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- c. Subbagian Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, Menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan serta kepegawaian. Kepala subbagian umum sebagai Pejabat Penilai kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Subagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan Menyusun, mengelola, membukukan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala subbagian keuangan sebagai Pejabat Penilai kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan daya air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- f. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepa dinas. Kepala Bidang Bina Marga sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

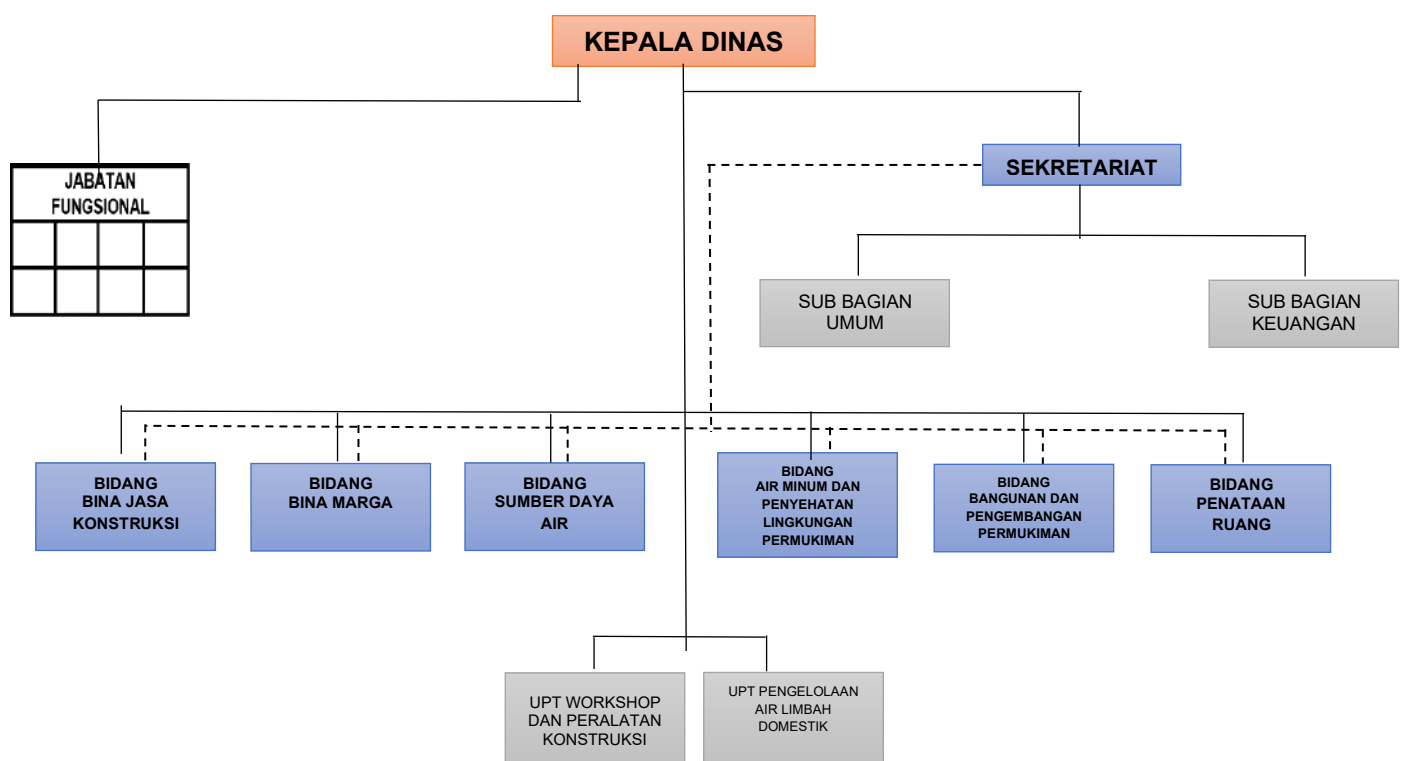
- Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Penataan Ruang sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - i. Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pengawasan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - j. Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Pengembangan Permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi di bentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik di bentuk untuk melaksanakan kegiatan operasional Dinas dibidang pengelolaan air limbah domestik. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025



————— Garis Komando

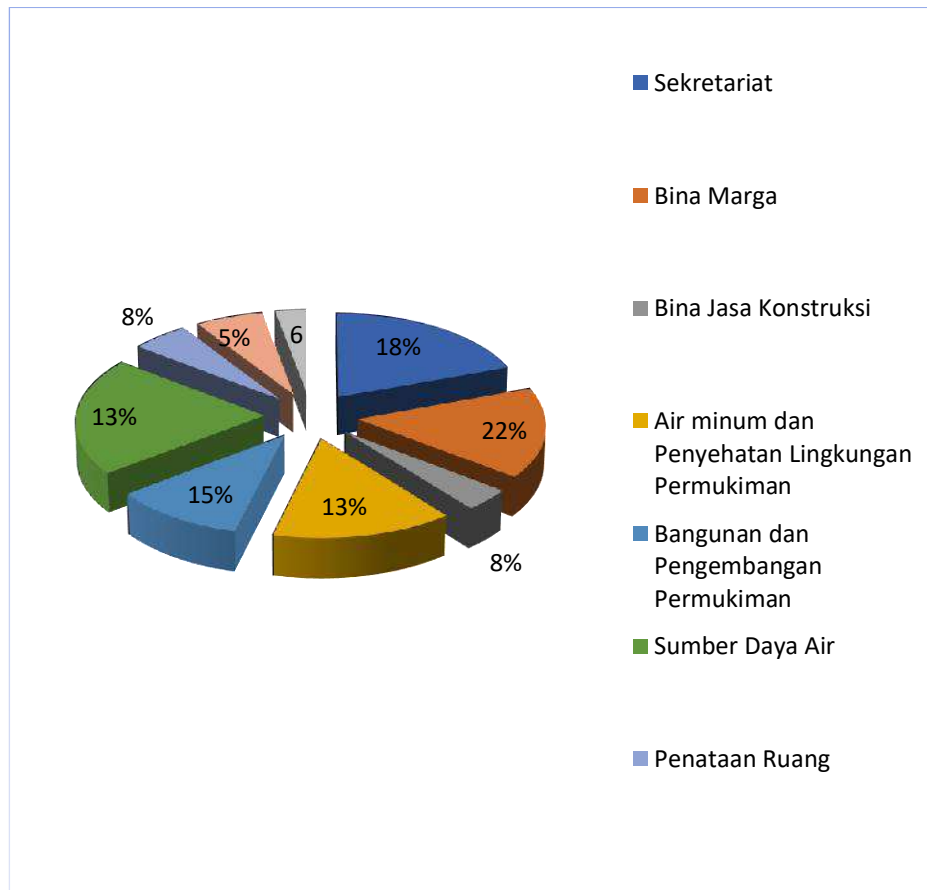
..... Garis Koordinasi Administratif

2. Dukungan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 206 (Dua Ratus Enam) orang Aparatur Sipil Negara (data per 31 Desember 2025). Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat, Bidang, UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi) disajikan pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1.1.

Grafik Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan pada Sekretariat, Bidang,
UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dan
UPT Pengelolaan Limbah Domestik
Per-31 Desember 2025



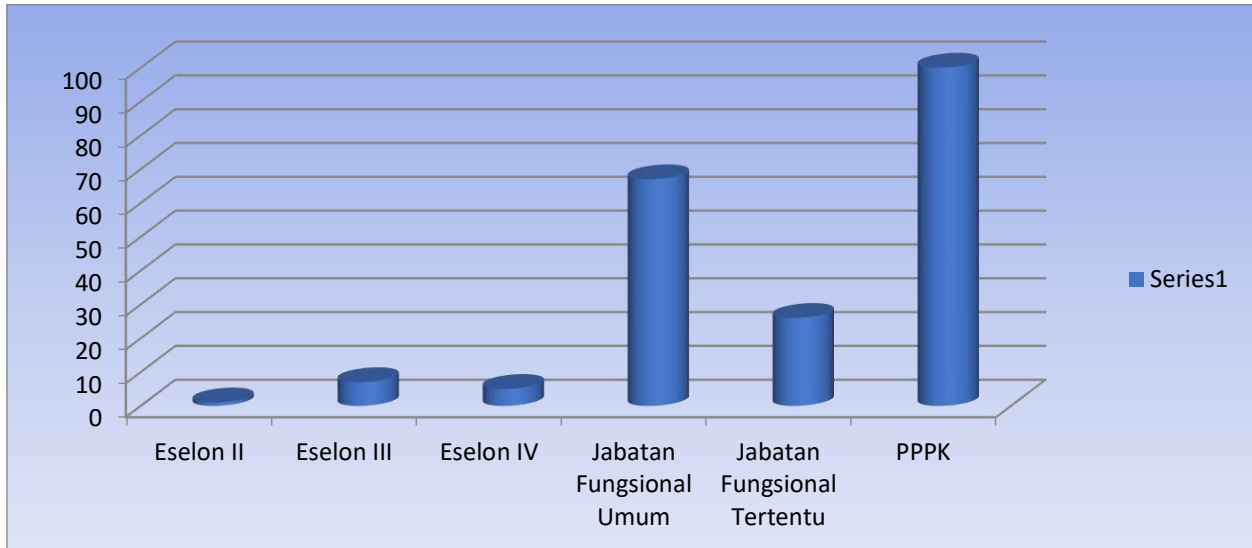
Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai

Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Tahun 2025

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pangkat/golongan dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab. Barito Selatan berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional per 31 Desember 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah Org
1	Jabatan Struktural	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	7
	c. Eselon IV	5
2	Jabatan Fungsional Umum	67
3	Jabatan Fungsional Tertentu	26
	Jumlah	206

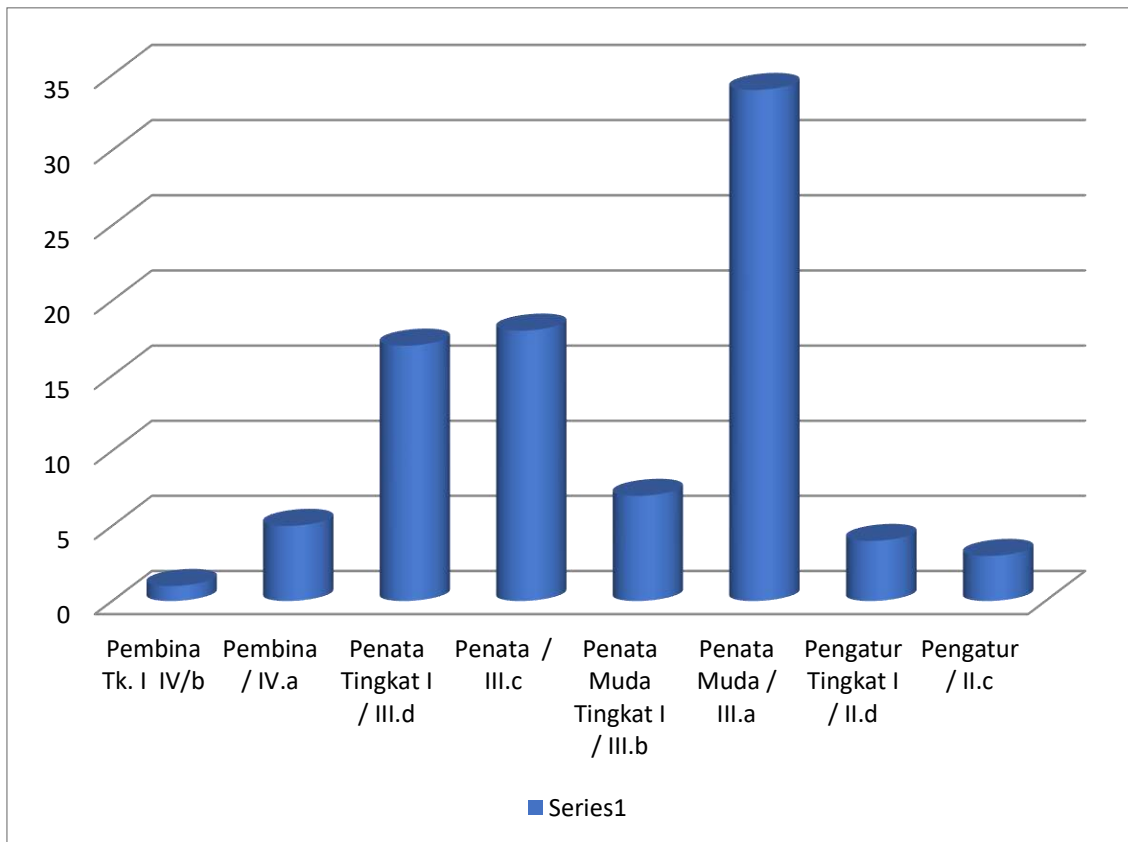


Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR
Kab. Barito Selatan Tahun 2025

Tabel I.2. Jumlah Pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Barito Selatan berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2025

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Org
1	Pembina Utama Muda IV/c	1
1	Pembina / IV.b	1
2	Pembina / IV.a	5
3	Penata Tingkat I / III.d	17
4	Penata / III.c	18
5	Penata Muda Tingkat I / III.b	7
6	Penata Muda / III.a	34
7	Pengatur Tingkat I / II.d	4
8	Pengatur / II.c	3
9	Pengatur Muda / II.a	11
10	PPPK (IX)	43
11	PPPK (VIII)	2
12	PPPK (V)	60
Jumlah		206

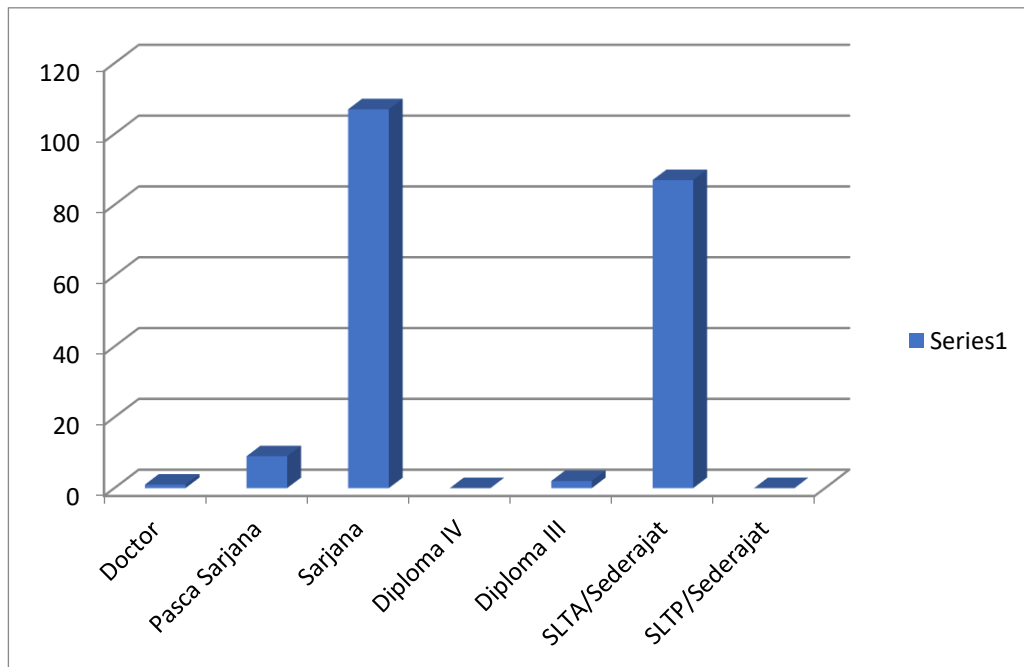
Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR
Kab.Barito Selatan Tahun 2025



Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas PU Kab.Barito Selatan Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025

No	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Org
1	Doctor	1
2	Pasca Sarjana	9
3	Sarjana	107
4	Diploma IV	0
5	Diploma III	2
6	SLTA/Sederajat	87
7	SLTP/Sederajat	0
	Jumlah	206

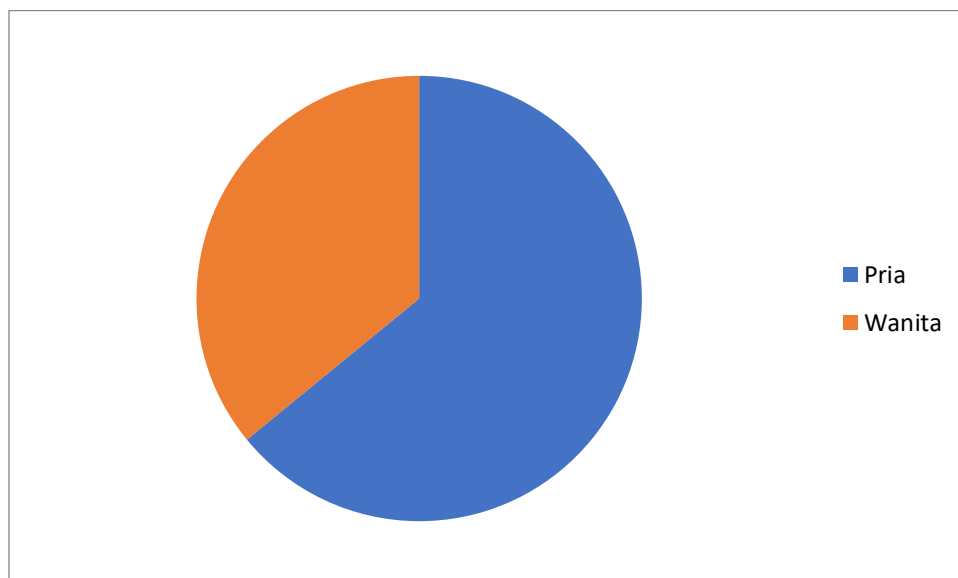
Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR
Kab.Barito Selatan Tahun 2025



Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan
Berdasarkan Gender
per 31 Desember 2025

No	Gender	Jumlah Org
1	Pria	132
2	Wanita	74
Jumlah		206

Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR
Kab.Barito Selatan Tahun 2025



I.4 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 463.473.797.144,00 dari APBD Murni Kabupaten Barito Selatan



Tahun Anggaran 2025. Setelah Perubahan Anggaran, Pagu Anggaran Bertambah Rp. 26.614.244.193,87 menjadi Rp. 490.088.041.337,87 dengan rincian disajikan pada Tabel I.5

Tabel I.5. Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
4.	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.570.000.000,00	Rp. 2.570.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 2.570.000.000,00	Rp. 2.570.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.570.000.000,00	Rp. 2.570.000.000,00
5	Belanja Daerah		
5.1	Belanja Operasi	Rp. 53.822.680.990,00	Rp. 70.269.321.251,87
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 8.679.757.461,00	Rp. 11.504.945.816,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	Rp. 45.142.923.529,00	Rp. 58.764.375.435,87
5.2	Belanja Modal	Rp. 409.651.116.154,00	Rp. 419.818.720.086,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 6.780.574.634,00	Rp. 7.595.534.254,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 118.980.000.000,00	Rp. 137.465.513.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 283.890.541.520,00	Rp. 274.757.672.332,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp. 14.392.700.466,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 0,00	Rp. 14.392.700.466,00
	Jumlah Belanja	Rp. 463.473.797.144,00	Rp. 490.088.041.337,87

Sumber Data : DPPA DPUPR Barsel TA.2025



I.5 Sistematika Pembahasan

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran strategi, kebijakan serta program-program pembangunan Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
Lampiran - lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, serta menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Barito Selatan, ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, permukiman, dan penataan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas barang dan jasa, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah yang cukup luas, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur eksisting, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.

Penyusunan perencanaan kinerja juga merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan setiap perangkat daerah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian yang jelas. Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat diarahkan pada pencapaian hasil (outcome) yang nyata, bukan sekadar realisasi fisik dan penyerapan anggaran. Selain itu, perencanaan kinerja menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, sehingga terdapat keterkaitan yang kuat antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan perencanaan kinerja pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur, memperkuat akuntabilitas publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

II.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagai salah satu instrumen utama dalam siklus perencanaan pembangunan, Renstra berfungsi sebagai dokumen yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun. Renstra menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dokumen penganggaran berbasis kinerja yang transparan, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, Renstra bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga merupakan komitmen organisasi terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan publik.

Secara normatif, penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan perlunya keselarasan antar dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota, serta integrasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Renstra ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Dinas PUPR dalam merencanakan pembangunan infrastruktur daerah secara lebih terarah, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan jangka panjang. Renstra ini dirancang agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, RPJMN 2025–2029 dan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini juga merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pengungkit utama dalam pencapaian target pembangunan, khususnya dalam memperkuat posisi strategis Barito Selatan sebagai penyangga pertumbuhan regional Kalimantan.

Penyusunan Renstra ini menjadi sangat relevan dan mendesak mengingat sejumlah tantangan utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Selatan, antara lain:

1. Masih adanya ketimpangan kualitas dan kuantitas infrastruktur antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai seluruh kebutuhan infrastruktur secara optimal;
3. Tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan;
4. Rendahnya keterpaduan tata ruang dengan program sektoral dan proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah; dan
5. Dinamika regulasi teknis di tingkat nasional dan provinsi yang mengharuskan sinkronisasi lintas sektor.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi internal Dinas PUPR dalam penyusunan Renja tahunan, serta alat koordinasi dan sinergi dengan lintas perangkat daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Renstra ini nantinya diharapkan tidak hanya sebagai dokumen perencanaan teknis dan alat perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani antara rencana dan implementasi pembangunan infrastruktur, serta menjadi sarana evaluasi kinerja Dinas PUPR dalam mendukung pembangunan Barito Selatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman operasional bagi Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan.
2. Menjamin terwujudnya keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan sektoral perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029.
3. Sebagai alat bantu manajerial dalam proses pengambilan keputusan strategis, pengorganisasian program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PUPR secara periodik.

Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan secara operasional visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan bidang

- pekerjaan umum dan penataan ruang yang relevan, terukur, dan berbasis hasil;
2. Menyusun kerangka program dan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang mampu menjawab isu-isu strategis wilayah, seperti ketimpangan konektivitas, rendahnya kualitas prasarana dasar, dan pertumbuhan wilayah yang belum merata;
 3. Menyediakan landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dan sebagai acuan penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS);
 4. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU), target kinerja, serta arah prioritas pembangunan infrastruktur secara akuntabel dan transparan dalam rangka pencapaian sasaran strategis daerah;
 5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan PUPR dengan memastikan keterpaduan antara perencanaan teknis sektoral, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya;
 6. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) melalui perencanaan yang berbasis hasil (result based planning) sesuai prinsip good governance.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijadikan dasar pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi adalah suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu organisasi/intansi diarahkan dengan tetap eksis dan konsisten serta aspirasi dan intervatip dalam perjuangannya atau juga merupakan suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang maju diwujudkan/dicapai oleh suatu organisasi/intansi. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan masa depan menuju kondisi yang diinginkan Kantor Kecamatan Dusun Hilir menetapkan visi sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Jika meninjau Visi dan Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan memiliki peran yang strategis dalam pencapaian arahan pembangunan Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PD Tahun 2025-2029 merupakan gambaran kondisi berupa intermediate outcome yang dapat diukur dan menggambarkan arah kebijakan Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan lingkup kewenangan dan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah, serta mencerminkan manfaat nyata yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi kelembagaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, yaitu: **“Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Barito Selatan terhadap infrastruktur berkualitas”**. Dengan Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Dusun Hilir menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi.
5. Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten.
6. Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik.
7. Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai.
8. Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan.
9. Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan.
10. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah.
11. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
12. Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

II.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks pemerintahan daerah, Renja yang dimaksud adalah Renja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen rencana kerja tahunan yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara normatif, penyusunan Renja berpedoman pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan mendasar tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, serta perubahan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD). Peraturan ini mengatur penyusunan RPJMD teknokratik, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah, serta menekankan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah secara transparan dan responsif.

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 yang sudah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung didalam Renstra seperti misi, tujuan, dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Sedangkan komponen-komponen yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	Bidang	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu 2025	
				Murni	Perubahan
				(Rp)	(Rp)
1.	Sekretariat	1	8	21.915.158.527,00	26.316.038.582,87
2.	Sumber Daya Air	1	2	53.500.451.250,00	53.703.821.238,00
3.	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permuikiman	4	4	36.253.099.000,00	36.128.003.120,00
4.	Bangunan dan Pengembangan Permukiman	3	3	159.642.518.000,00	197.319.125.800,00
5.	Bina Marga	1	1	188.672.570.367,00	173.630.567.597,00
6.	Bina Jasa Konstruksi	1	4	1.400.000.000,00	1.222.550.000,00
7.	Penataan Ruang	1	3	2.090.000.000,00	1.767.935.000,00

Tabel 2.2 Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Taget		
		Output	Volume	Satuan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	Org/Bln
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			



Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	KM
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	20	Lembaga
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	20	Lembaga
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2	KM
Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	3	Unit



Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2	KM
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	Dokumen
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	Unit
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1	Dokumen
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	Dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5	KM
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	1	KM
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	2	KM
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	10	KM
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	0	Kawasan Rawa
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	15	DI



Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota			
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10	Orang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10	Liter/Detik
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Jaringan Perpipaan	500	SR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,1	Ton/hari
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	Unit



Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Unit
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	175	Rumah Tangga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500	M
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100	M
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	25	Sistem Drainase Lingkungan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1	Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250	Rumah Tangga
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	20	Bangunan Gedung Negara



Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	7	Bangunan Gedung
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12	Bantuan Teknis
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	40	Dokumen
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	Dokumen
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	55	Dokumen
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1035,4	KM



Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	4	KM
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15	KM
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2	KM
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	50	KM
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dirhabilitasi	5	Jembatan
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	Jembatan
Pembangunan Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	1035,4	KM
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20	KM
Pemeliharaan Rutin Jalan			
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Penyediaan Training Need Assessment TNA Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	Dokumen
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	Orang
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Lembaga
Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	2	Orang



Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	2	Lembaga
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1	Dokumen
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	Dokumen
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50	Orang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	10	Perangkat Pendukung
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	Dokumen
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Orang
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10	Layanan Informasi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1	Dokumen
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen



Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	25	Lembaga
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	2	Badan Usaha
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1	Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2	Dokumen
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Kegiatan
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	6	Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	Dokumen

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjadi acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 188.45/5658/SK/X/PUPR-2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.45/241/SK/II/PUPR-2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	Perbandingan panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan Total Panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten) x 100%	39,53%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	Perbandingan panjang infrastruktur jembatan kabupaten kondisi baik dengan Total Panjang jalan kabupaten x 100%	55%
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	Perbandingan jumlah kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik dengan jumlah total Kawasan strategis kabupaten x 100%	0,5%



4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	Perbandingan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik dengan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten x 100%	66,35%
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	80%
6.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	76%
7.	Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)	Perbandingan jumlah infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai dengan jumlah total infrastruktur sistem persampahan skala kota x 100%	55%
8.	Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	Perbandingan Panjang drainase dalam kondisi baik dengan panjan saluran drainase keseluruhan sesuai database x 100%	68%
9.	Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)	Perbandingan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dengan jumlah total kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah x 100%	76%



10.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW dengan luas RTRW x 100%	35%
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	B
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi
12.	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	Perbandingan ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi dengan jumlah total data dan informasi jasa konstruksi x 100%	70%
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi x 100%	50%
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib usaha jasa konstruksi x 100%	60%
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi x 100%	70%

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun



prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada Renstra. Komponen - komponen yang terkandung di dalam Renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Sedangkan komponen-komponen yang terkandung di dalam Renja meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra. Setiap sasaran strategis diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai, demikian pula kegiatan dirinci ke dalam target indikator input, output, dan outcome. Dalam Penyampaian Lakip ini, perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilakukan perubahan menyesuaikan dengan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Ringkasan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 disajikan di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025****DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Dr. ITA MINARNI, ST., MT**
JABATAN : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **EDDY RAYA SAMSURI**
JABATAN : **BUPATI BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab kami sesuai dengan batas pengendalian dan kewenangan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 29 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan

Dr. ITA MINARNI, ST., MT
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19790812 200802 2 001



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	Perbandingan panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan Total Panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten) x 100%	39,53%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	Perbandingan panjang infrastruktur jembatan kabupaten kondisi baik dengan Total Panjang jalan kabupaten x 100%	55%
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	Perbandingan jumlah kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik dengan jumlah total Kawasan strategis kabupaten x 100%	0,5%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	Perbandingan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten x 100%	66,35%
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	80%
6.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	76%
7.	Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)	Perbandingan jumlah infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai dengan jumlah total infrastruktur sistem persampahan skala kota	55%

Gambar 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

8.	Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	Perbandingan Panjang drainase dalam kondisi baik dengan panjang saluran drainase keseluruhan sesuai database x 100%	68%
9.	Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)	Perbandingan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dengan jumlah total kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah x 100%	76%
10.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW dengan luas RTRW x 100%	35%
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	B
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi
12.	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	Perbandingan ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi dengan jumlah total data dan informasi jasa konstruksi x 100%	70%
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi x 100%	50%
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib usaha jasa konstruksi x 100%	60%
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	Perbandingan data pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dengan jumlah total data pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi x 100%	70%

Gambar 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.316.038.583,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 53.703.821.238,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 22.280.161.120,00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 600.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.287.942.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 6.059.900.000,00
Program Pengembangan Permukiman	Rp. 50.119.948.500,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 146.151.874.800,00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 947.302.500,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 173.630.567.597,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.222.550.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.767.935.000,00
JUMLAH	Rp. 490.088.041.337,87



Buntok, 29 September 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan
Dr. ITA MINARNI, ST., MT
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19790812 200802 2 001

Gambar 2.3 Rekapitulasi Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintah, karena tanpa akuntabilitas kinerja, bisa terjadi suatu instansi pemerintah dan semua aparatnya bekerja sesuai tugas dan fungsinya, meskipun mempunyai sasaran dan target kinerja, namun sasaran dan target kerjanya tidak berorientasi hasil atau outcome, dan tidak mempunyai indikator/ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga apakah berhasil atau tidak dan bagaimana tingkat keberhasilannya tidak jelas, apakah instansi pemerintah yang bersangkutan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya atau tidak juga tidak jelas.

Selain itu, tanpa akuntabilitas kinerja bisa saja terjadi aparat instansi pemerintah akan bekerja asal-asalan, dengan prinsip yang penting bekerja, karena tanpa indikator keberhasilan dan target yang jelas, dan tidak dimintai pertanggungjawaban kinerja, apakah target tercapai atau tidak, apakah berhasil atau tidak, tidak ada pertanggungjawaban dan konsekuensinya. Akuntabilitas kinerja bukan hanya merupakan urusan dan tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah atau aparat yang menangani akuntabilitas kinerja, namun juga merupakan urusan dan tanggung jawab semua aparat instansi pemerintah yang bersangkutan, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya.

III.1 Capaian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kerangka Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran dengan

realisasinya. Rincian singkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

*Tabel III.2
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	39,53	33,50

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui belum mencapai target namun hal tersebut dikarenakan terdapat pembaruan status ruas jalan sebagai jalan Kabupaten Barito Selatan, yang awal nya total 1035,04 Km menjadi 875,55 Km.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

*Tabel III.3
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur Jembatan	55	65,59

	Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)		
--	---------------------------------------	------------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh perencanaan teknis yang matang sehingga memenuhi target capaian kinerja serta adanya dukungan anggaran dan pengawasan teknis yang ketat.

3. Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis

*Tabel III.4
Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas infrastruktur
di permukiman kawasan strategis*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	0,50	0,64%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan melakukan sinergi program lintas bidang serta dukungan program nasional, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi

*Tabel III.5
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi	66,35	68,70

		dalam kondisi baik (%)		
--	--	------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melakukan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi secara bertahap dan optimalisasi peran petani pemakai air (P3A).

5. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

Tabel III.6
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	80,00	80,97

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan peningkatan cakupan layanan perpipaan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi.

6. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Tabel III.7
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	76,00	76,20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan pembangunan tangki septik individu maupun komunal di kawasan prioritas.

7. Sasaran Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

Tabel III.8
Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)	55,00	57,89

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan kesinambungan program dan dukungan Pengadaan dan rehabilitasi fasilitas persampahan secara bertahap meningkatkan kapasitas layanan.

8. Sasaran Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

Tabel III.9
Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	68,00	68,57

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan perbaikan dan pembersihan saluran drainase secara rutin meningkatkan kapasitas aliran air.

9. Sasaran Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

Tabel III.10
Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)	76,00	80,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan intensifikasi pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pengawasan.

10. Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah

*Tabel III.11
Meningkatnya Perencanaan,
Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	35,00	43,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan telah melaksanakan intensifikasi pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pengawasan.

11. Sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

*Tabel III.12
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	B	Dalam Tahap Evaluasi
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi dan untuk Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) sudah terdefinisi, dikarenakan komitmen pimpinan dalam pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan pemahaman perencanaan dan pelaporan kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

Tabel III.13
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	70,00	90,00
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	50,00	30,00

		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	60,00	30,00
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	70,00	50,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%) capaian sudah melebihi target namun untuk Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%), Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%), Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%) masih dibawah target hal ini dikarenakan penetapan indikator baru di masukan ke dalam Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR pada tahun 2025.

III.1.2 Membandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

*Tabel III.14
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	34,67	36,50	40,01	33,50

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

*Tabel III.15
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	50,17	51,25	54,05	65,59

3. Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis

Tabel III.16
Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas infrastruktur
di permukiman kawasan strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	1,00	1,00	0,39	0,64

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi

Tabel III.17
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi	23,60	34,49	66,15	68,70



		dalam kondisi baik (%)				
--	--	------------------------	--	--	--	--

5. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

Tabel III.18
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	58,41	77,68	79,98	80,97

6. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Tabel III.19
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase Penting Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi(Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	65,39	64,96	75,56	76,20

7. Sasaran Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

Tabel III.20
Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)				57,89

8. Sasaran Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

Tabel III.21
Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	23,60	34,49	66,15	68,57

9. Sasaran Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

Tabel III.22
Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025



1	Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)				80,00
---	---	---	--	--	--	-------

10. Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah

Tabel III.23
Meningkatnya Perencanaan,
Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	20,00	22,00	35,00	43,00

11. Sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

Tabel III.24
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	CC	B	B	Dalam Tahap Evaluasi



		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

Tabel III.25
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)				90,00
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)				30,00
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)				30,00
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)				50,00

III.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III.26 Perbandingan Realisasi
Kinerja dengan Dokumen Renstra DPUPR 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target dalam Rencana Strategis (%)	Realisasi Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	39,53	33,50
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	55,00	65,59
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	0,50	0,64
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	66,35	68,70
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	80,00	80,97
6.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	76,00	76,20



7.	Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)	55,00	57,89
8.	Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	68,00	68,57
9.	Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)	76,00	80,00
10.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	35,00	43,00
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	B	
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi
12.	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	70,00	90,00
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	50,00	30,00
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	60,00	30,00
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	70,00	50,00

III.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel III.27 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Faktor Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
1.	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	39,53	33,50	Masih dikatakan berhasil, turun dari target karena terdapat pembaruan status ruas jalan Kabupaten Barito Selatan.	Pada pelaporan tahun mendatang akan dilakukan penyesuaian target kinerja.
2.	Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	55,00	65,59	Dipengaruhi oleh perencanaan teknis yang matang sehingga memenuhi target capaian kinerja serta adanya dukungan anggaran dan pengawasan teknis yang ketat.	akan melakukan review secara berkala agar capaian kinerja terus meningkat.
3.	Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%)	0,50	0,64	Telah melakukan sinergi program lintas bidang serta dukungan program nasional, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.	Akan dilakukan peningkatan integrasi perencanaan kawasan serta pemutakhiran data kawasan strategis sebagai dasar intervensi program.
4.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	66,35	68,70	Telah melakukan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi secara bertahap dan optimalisasi peran petani pemakai air (P3A).	Akan melakukan review berkelanjutan untuk penguatan operasi dan pemeliharaan serta peningkatan koordinasi dengan sektor pertanian.
5.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki	80,00	80,97	Telah melaksanakan peningkatan	Akan dilakukan peningkatan cakupan layanan,



	akses air minum layak (%)			cakupan layanan perpipaan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi..	pemeliharaan infrastruktur eksisting, serta penguatan edukasi masyarakat
6.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	76,00	76,20	Telah melaksanakan pembangunan tangki septik individu maupun komunal di kawasan prioritas.	Ke depan, fokus diarahkan pada pemerataan akses serta peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.
7.	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)	55,00	57,89	Telah melaksanakan kesinambungan program dan dukungan Pengadaan dan rehabilitasi fasilitas persampahan secara bertahap meningkatkan kapasitas layanan.	fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas sistem, efisiensi operasional, serta keberlanjutan pengelolaan sampah.
8.	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%)	68,00	68,57	Telah melaksanakan perbaikan dan pembersihan saluran drainase secara rutin meningkatkan kapasitas aliran air.	penguatan pemeliharaan dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.
9.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%)	76,00	80,00	Telah melaksanakan intensifikasi pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta	peningkatan sosialisasi penegakan ketentuan pemanfaatan ruang secara bertahap.



				penguatan peran pengawasan.	
10.	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	35,00	43,00	Telah melaksanakan intensifikasi pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pengawasan.	peningkatan sosialisasi RTRW secara bertahap.
11.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	B		Capaian kinerja Nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi.	Capaian kinerja Nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi.
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Komitmen pimpinan dalam pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan pemahaman perencanaan dan pelaporan kinerja.	penguatan manajemen risiko dan keterkaitan kinerja dengan penganggaran.
12.	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	70,00	90,00	Adanya koordinasi yang lebih intensif antara bidang bina konstruksi, perencanaan, dan pengawasan sehingga proses pengumpulan dan pemutakhiran data menjadi lebih sistematis.	Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola jasa konstruksi berbasis data di lingkungan Dinas PUPR. Namun demikian untuk keberlanjutan pemutakhiran data dan peningkatan kualitas pengawasan tetap menjadi prioritas pada tahun berikutnya.
	Persentase pengawasan	50,00	30,00	Sebaran lokasi proyek yang	langkah-langkah perbaikan telah

	tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)			cukup luas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan merata sehingga masih belum dapat mencapai target.	dirumuskan dan akan menjadi fokus peningkatan kinerja pada periode mendatang guna memperkuat tata kelola jasa konstruksi yang akuntabel dan berkualitas.
	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	60,00	30,00	Terdapat perubahan sistem perizinan berbasis OSS dan transformasi kelembagaan jasa konstruksi memerlukan proses penyesuaian di tingkat daerah.	langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan dan akan menjadi fokus peningkatan kinerja pada periode mendatang guna memperkuat tata kelola jasa konstruksi yang akuntabel dan berkualitas.
	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	70,00	50,00	Terdapat kendala cuaca yang menyebabkan hambatan teknis di lapangan.	Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengawasan, optimalisasi sistem monitoring, dan penguatan pengendalian internal guna mendukung tata kelola jasa konstruksi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

III.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas bila dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin dilakukan dengan secara efisien, namun belum tentu efektif. Oleh karena itu, indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara Bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien maka

program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. Untuk melihat hubungan antara anggaran yang digunakan dan kinerja yang dicapai maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Anggaran} = (\text{Capaian Kinerja/Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Keterangan :

Jika Efisiensi Kinerja >100%, maka anggaran digunakan secara optimal.

Jika Efisiensi Kinerja <100%, ada indikasi efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Tabel III. 28 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Capaian (Rp)	Realisasi (%)
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	232.000.000	214.558.212	92,48
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000	24.965.000	99,86
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30.520.000	30.485.000	99,89
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	2	30.000.000	30.000.000	100



		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	50.000.000	44.567.800	89,14
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	4.961.700	99,23
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.220.340.000	1.450.490.781	65,33
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	170.000.000	153.450.000	90,26
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.002.000.000	830.451.950	82,88
3.	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	24.952.500	99,81
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	176.000.000	175.612.800	99,78
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	19.571.400	97,86
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	222.260.000	221.950.000	99,86
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	61.455.912,87	61.455.900	100



		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.500.000	12.487.600	99,90
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	9.638.500	96,39
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	50.500.000	45.500.000	90,10
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	565.048.750	563.365.656	99,70
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	9.918.900	99,19
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000	18.920.000	94,60
4.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	5.698.740.000	5.542.718.000	97,26
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	407.730.104	404.646.504	99,24
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	805.844.000	804.761.800	99,87
5.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	94	11.504.945.816	9.820.332.782	98,50
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	404.778.000	357.284.000	88,27
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	6	25.000.000	24.816.800	99,27



		Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	25.000.000	24.950.700	99,80
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	205.000.000	194.884.050	95,07
6.	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	84.000.000	83.911.600	99,89
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	32.500.000	31.460.000	96,80
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	50.000.000	49.731.000	99,46
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	10.000.000	8.638.000	86,38
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	181.800.000	181.383.750	99,77
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	12.125.000	12.125.000	100
7.	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	1	467.000.000	421.570.296	90,27



	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan dibayarkan Pajaknya					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	145.000.000	70.970.109	48,94
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	5	563.400.000	562.619.792	99,86
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	30.000.000	30.000.000	100
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	40.000.000	17.275.000	43,19
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	119.655.000	99,71
8.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	191.750.000	190.910.565	99,56
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	21.321.000	21.321.000	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	20.040.000	13.700.000	68,36
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	282.400.000	232.915.240	82,47
9.	Terlaksananya Pembangunan infrastruktur sungai untuk melindungi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	139.266.500	117.205.086	84,16



	Masyarakat dari banjir						
		Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	1.499.950.000	1.433.505.000	95,57
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	20	161.040.000	99.108.300	61,54
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	21.000.000	20.981.399	99,91
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	20	151.500.000	108.423.150	71,57
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi	KM	2	11.639.937.500	11.621.301.500	99,84
		Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	3	982.920.000	982.920.000	100
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	2	16.714.663.000	16.241.778.700	97,17
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1.202.291.388	1.112.764.513	92,55
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	1	150.000.000	144.450.100	96,30
		Jumlah Embung dan Penampung	Unit	1	1.477.896.000	1.465.396.000	99,15



		Air Lainnya yang Dibangun					
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	66.360.000	62.289.999	93,87
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	63.450.000	63.078.250	99,41
10.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0,5	745.300.000	736.300.000	98,79
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	1	8.828.700.200	8.805.200.200	99,73
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM	2	1.964.200.000	1.674.120.000	85,23
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	10	3.092.689.400	3.091.244.400	99,95
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	5	799.950.000	793.978.000	99,25
		Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Kawasan Rawa	0	65.506.200	64.718.000	98,80
		Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan	DI	15	2.036.909.050	1.966.650.049	96,55



		Terawasi Alokasi Airnya					
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	1.900.292.000	1.884.575.630	99,17
11.	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	10	700.000.000	688.889.000	98,41
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	1.975.161.120	1.758.232.966	89,02
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	10	6.350.000.000	6.350.000.000	100
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	200.000.000	199.778.000	99,89
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	500	12.955.000.000	12.845.678.000	99,16
12.	Tersedianya pengembangan system persampahan di daerah kabupaten /kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	0,1	600.000.000	600.000.000	100



13.	Akses Masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	275.879.000	182.609.300	66,19
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	100.000.000	99.889.000	99,89
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	175	6.912.063.000	6.911.648.900	99,99
14.	Kualitas sistem drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	500	2.261.500.000	2.261.500.000	100
		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	M	100	100.000.000	99.760.000	99,76
		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	25	3.198.600.000	3.193.140.000	99,83
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	499.800.000	498.600.000	99,76
15.	Kualitas infrastruktur permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	250	50.119.948.500	49.871.459.022	99,50
16.	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	20	7.090.000	0	0
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Bangunan Gedung	7	91.965.487.800	89.534.447.700	97,36



		Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan					
		Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	12	30.000.000	19.757.900	65,86
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	53.644.010.500	52.285.968.672	97,47
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	40	605.286.500	543.610.600	89,81
17.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2	40.000.000	37.794.900	94,49
		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di	Dokumen	1	907.302.500	828.979.131	91,37



		Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
18.	Meningkatnya aksesibilitas Masyarakat yang nyaman dan aman	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	55	4.210.133.167	3.912.089.441	92,92
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	1035,4	1.379.520.160	1.346.743.100	97,62
		Panjang Jalan yang Dibangun	KM	4	54.423.345.000	54.299.487.150	99,77
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	15	94.846.218.232	93.470.977.500	98,55
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	2	2.980.000.000	2.945.000.000	98,83
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	50	164.634.000	149.708.000	90,93
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	5	1.084.159.038	930.511.250	85,83
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	5	2.987.163.000	2.986.325.500	99,97
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2	4.837.395.000	4.836.042.200	99,97
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1035,4	1.000.000.000	996.336.000	99,63
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	20	5.718.000.000	5.633.622.741,10	98,52



19.	Kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1	4.900.000	2.249.000	45,90
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	50	75.000.000	74.900.000	99,87
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20	37.160.000	21.608.000	58,15
		Jumlah Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang	2	10.640.000	10.639.900	100
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga	2	5.900.000	5.900.000	100
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Dokumen	1	8.800.000	8.799.900	100
		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1	3.250.000	3.249.500	99,98



		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	50	358.300.000	325.646.432	90,89
20.	Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	10	25.000.000	24.816.100	99,26
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	230.000.000	228.895.808	99,52
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	15.500.000	14.726.901	95,01
		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	10	42.200.000	42.122.000	99,82
21.	Tertatanya Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi)	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Dokumen	1	18.400.000	18.158.000	98,68
		Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	6.600.000	6.590.000	99,85
22.	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Lembaga	25	352.400.000	313.967.028	89,09



	n jasa konstruksi						
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Badan Usaha	2	25.000.000	16.850.000	67,40
		Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen	1	3.500.000	3.499.800	99,99
23.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.214.028.000	1.170.760.200	96,44
		Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	1	32.081.000	23.341.000	72,76
24.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang kabupaten/kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	6	137.629.000	107.625.121	78,20
25.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	4	384.197.000	302.173.686	78,65



III.2 Realisasi Anggaran

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Dusun Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut :

III.2.1 Sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

Tabel III. 29 Capaian Kinerja Anggaran
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	232.000.000	82.000.000	92,48	214.558.212
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	25.000.000	25.000.000	0	100	25.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.000.000	25.000.000	0	100	25.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25.000.000	25.000.000	0	99,86	24.965.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	25.000.000	30.520.000	0	99,89	30.485.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	100	30.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	89,14	44.567.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.679.757.461	11.504.945.816	2.825.188.355	98,50	9.820.332.782
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	468.497.000	404.778.000	(63.719.000)	88,27	357.284.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	25.000.000	0	99,27	24.816.800
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	25.000.000	0	99,80	24.950.700
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	157.000.000	205.000.000	48.000.000	95,07	194.884.050



	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	84.000.000	64.000.000	99,89	83.911.600
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	32.500.000	7.500.000	96,80	31.460.000
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	50.000.000	0	99,46	49.731.000
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	86,38	8.638.000
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	181.800.000	106.800.000	99,77	181.383.750
18	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	25.000.000	12.125.000	(12.875.000)	100	12.125.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.750.000	191.750.000	50.000.000	99,56	190.910.565
20	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.321.000	21.321.000	0	100	21.321.000
21	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	75.000.000	20.040.000	(54.960.000)	68,36	13.700.000
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	300.000.000	282.400.000	(17.600.000)	82,47	232.915.240
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	0	99,81	24.952.500
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	176.000.000	111.000.000	99,78	175.612.800
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	0	97,86	19.571.400
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.260.000	222.260.000	0	99,86	221.950.000
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.452.462	61.455.912,87	0	100	61.455.900
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000	12.500.000	0	99,90	12.487.600
29	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	0	96,39	9.638.500
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.500.000	500.000	90,10	45.500.000
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.469.500	565.048.750	(27.420.750)	99,70	563.365.656



32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0	99,19	9.918.900
33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	20.000.000	0	94,60	18.920.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
34	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.422.240.000	5.698.740.000	1.276.500.000	97,26	5.542.718.000
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	598.630.104	407.730.104	(190.900.000)	99,24	404.646.504
36	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.006.844.000	805.844.000	(201.000.000)	99,87	804.761.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	99,23	4.961.700
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.100.000	2.220.340.000	220.240.000	65,33	1.450.490.781
39	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	170.000.000	35.000.000	90,26	153.450.000
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.222.658.000	1.002.000.000	(220.658.000)	82,88	830.451.950
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	467.000.000	167.000.000	90,27	421.570.296
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	145.000.000	(35.000.000)	48,94	70.970.109
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	285.000.000	563.400.000	278.400.000	99,86	562.619.792
44	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	100	30.000.000
45	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	43,19	17.275.000
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	120.000.000	0	99,71	119.655.000



III.2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi

Tabel III. 29 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
47	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	300.000.000	139.266.500	(160.733.500)	84,16	117.205.086
48	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.000.000.000	1.499.950.000	499.950.000	95,57	1.433.505.000
49	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	300.000.000	161.040.000	(138.960.000)	61,54	99.108.300
50	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	21.000.000	(29.000.000)	99,91	20.981.399
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	300.000.000	151.500.000	(148.500.000)	71,57	108.423.150
52	Normalisasi/Restorasi Sungai	8.025.000.000	11.639.937.500	3.614.937.500	99,84	11.621.301.500
53	Pembangunan Check Dam	1.000.000.000	982.920.000	(17.080.000)	100	982.920.000
54	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	20.125.000.000	16.714.663.000	(3.410.337.000)	97,17	16.241.778.700
55	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.560.635.000	1.202.291.388	(358.343.612)	92,55	1.112.764.513
56	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	150.000.000	150.000.000	0	96,30	144.450.100
57	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.500.000.000	1.477.896.000	(22.104.000)	99,15	1.465.396.000
58	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	100.000.000	66.360.000	(33.370.000)	93,87	62.289.999
59	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	150.000.000	63.450.000	(86.550.000)	99,41	63.078.250



	Bangunan Penampung Air Lainnya					
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
60	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	750.000.000	745.300.000	(4.700.000)	98,79	736.300.000
61	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	9.000.000.000	8.828.700.200	(171.299.800)	99,73	8.805.200.200
62	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	2.000.000.000	1.964.200.000	(35.800.000)	85,23	1.674.120.000
63	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	2.900.000.000	3.092.689.400	192.689.400	99,95	3.091.244.400
64	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	800.000.000	799.950.000	(50.000)	99,25	793.978.000
65	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	100.000.000	65.506.200	(34.493.800)	98,80	64.718.000
66	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	2.189.816.250	2.036.909.050	(152.907.200)	96,55	1.966.650.049
67	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.200.000.000	1.900.292.000	700.292.000	99,17	1.884.575.630

III.2.3 Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

Tabel III. 30 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota					
68	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	700.000.000	700.000.000	0	98,41	688.889.000
69	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.835.000.000	1.975.161.120	140.161.120	89,02	1.758.232.966



70	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	6.500.000.000	6.350.000.000	(150.000.000)	100	6.350.000.000
71	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	750.000.000	200.000.000	(550.000.000)	99,89	199.778.000
72	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	12.865.000.000	12.955.000.000	90.000.000	99,16	12.845.678.000

III.2.4 Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

Tabel III. 31 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
IV	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
73	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600.000.000	600.000.000	0	100	600.000.000

III.2.5 Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Tabel III. 32 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
V	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
74	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	341.036.000	275.879.000	(65.157.000)	66,19	182.609.300
75	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	100.000.000	100.000.000	0	99,89	99.889.000
76	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	7.462.063.000	6.912.063.000	(550.000.000)	99,99	6.911.648.900

III.2.6 Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

Tabel III.33 Capaian Kinerja Anggaran
Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
VI	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
77	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.300.000.000	2.261.500.000	(38.500.000)	100	2.261.500.000
78	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	100.000.000	0	99,76	99.760.000
79	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	2.400.000.000	3.198.600.000	798.600.000	99,83	3.193.140.000
80	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	300.000.000	499.800.000	199.800.000	99,76	498.600.000

III.2.7 Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis

Tabel III.34 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
VII	Program Pengembangan Permukiman					
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
81	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di	34.335.000.000	50.119.948.500	15.784.948.500	99,50	49.871.459.022



Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

III.2.8 Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

Tabel III.35 Capaian Kinerja Anggaran
Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Program Penataan Bangunan Gedung					
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
82	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	35.000.000	7.090.000	(27.910.000)	0	0
83	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	65.475.000.000	91.965.487.800	26.490.487.800	97,36	89.534.447.700
84	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	0	65,86	19.757.900
85	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	57.822.518.000	53.644.010.500	(4.178.507.500)	97,47	52.285.968.672
86	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	705.000.000	605.286.500	(99.713.500)	89,81	543.610.600
IX	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
87	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	40.000.000	40.000.000	0	94,49	37.794.900
88	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan	1.200.000.000	907.302.500	(292.697.500)	91,37	828.979.131



	dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
--	---	--	--	--	--	--

III.2.9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Tabel III.36 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
X	Program Penyelenggaraan Jalan					
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
89	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.738.770.767	4.210.133.167	1.471.362.400	92,92	3.912.089.441
90	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.883.258.080	1.379.520.160	(503.737.920)	97,62	1.346.743.100
91	Pembangunan Jalan	53.950.000.000	54.423.345.000	473.345.000	99,77	54.299.487.150
92	Rekonstruksi Jalan	118.135.541.520	94.846.218.232	(23.289.323.288)	98,55	93.470.977.500
93	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.000.000.000	2.980.000.000	980.000.000	98,83	2.945.000.000
94	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	300.000.000	164.634.000	(135.366.000)	90,93	149.708.000

III.2.10 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

Tabel III.37 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
95	Pemeliharaan Rutin Jembatan	490.000.000	1.084.159.038	594.159.038	85,83	930.511.250
96	Rehabilitasi Jembatan	2.675.000.000	2.987.163.000	312.163.000	99,97	2.986.325.500
97	Pembangunan Jembatan	3.800.000.000	4.837.395.000	1.037.395.000	99,97	4.836.042.200
98	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	99,63	996.336.000



99	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.700.000.000	5.718.000.000	4.018.000.000	98,52	5.633.622.741,10
----	--------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	------------------

III.2.11 Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

Tabel III.38 Capaian Kinerja Anggaran
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
XI	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					
100	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	20.000.000	4.900.000	(15.100.000)	45,90	2.249.000
101	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	75.000.000	75.000.000	0	99,87	74.900.000
102	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	65.000.000	37.160.000	(27.840.000)	58,15	21.608.000
103	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	20.000.000	10.640.000	(9.360.000)	100	10.639.900
104	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	10.000.000	5.900.000	(4.100.000)	100	5.900.000
105	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	25.000.000	8.800.000	(16.200.000)	100	8.799.900
106	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	10.000.000	3.250.000	(6.750.000)	99,98	3.249.500
107	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200.000.000	358.300.000	158.300.000	90,89	325.646.432
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					



108	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	25.000.000	25.000.000	0	99,26	24.816.100
109	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/kota	310.500.000	230.000.000	(80.500.000)	99,52	228.895.808
110	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	25.000.000	15.500.000	9.500.000	95,01	14.726.901
111	Operasional Layanan Informasi Jasa konstruksi	42.200.000	42.200.000	0	99,82	42.122.000
	Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					
112	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	29.000.000	18.400.000	(10.600.000)	98,68	18.158.000
113	Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	75.000.000	6.600.000	(68.400.000)	99,85	6.590.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					
114	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/kota	385.000.000	352.400.000	(32.600.000)	89,09	313.967.028
115	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	63.300.000	25.000.000	(38.300.000)	67,40	16.850.000
116	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	20.000.000	3.500.000	(16.500.000)	99,99	3.499.800

III.2.12 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah

Tabel III.39 Capaian Kinerja Anggaran

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA			REALISASI FISIK	
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
XII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
117	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.380.000.000	1.214.028.000	(165.972.000)	96,44	1.170.760.200
118	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	40.000.000	32.081.000	(7.919.000)	72,76	23.341.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
119	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	140.000.000	137.629.000	(2.371.000)	78,20	107.625.121
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
120	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	530.000.000	384.197.000	(145.803.000)	78,65	302.173.686

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 bisa disimpulkan sangat berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tidak akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LaKIP Tahun 2025, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.